



Analisis Peningkatan Kapasitas Masyarakat Rentan Bencana Di Nagari Binjai Tapan Dan Nagari Kampung Tengah Tapan

Zikri Alhadi¹, Pratiwi Nurhabibie², Azhari Syarief³

¹²Prodi Administrasi Publik., Universitas Negeri Padang

³Prodi Geografi, Universitas Negeri Padang

Email: zikrialhadi@fis.unp.ac.id

Abstrak

Belajar dari peristiwa gempa bumi yang melanda Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 September 2009 yang lalu, semestinya seluruh elemen – elemen masyarakat berusaha mempersiapkan diri sedini mungkin agar selalu siap siaga dalam menghadapi kemungkinan terburuk. Dengan adanya upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana sehingga diharapkan bisa meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun harta benda. Di Nagari Binjai Tapan dan Nagari Kampung Tengah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lokasi pengabdian masyarakat, secara geografis sangat rentan atas berbagai jenis bencana seperti banjir bandang, longsor, dan gempa. Tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana tersebut membuat banyak nagari terancam, baik penduduk maupun mata pencahariannya. Untuk itu, berbagai kegiatan pra-bencana dalam upaya meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana juga perlu direncanakan dan diimplementasikan. Kegiatan pra-bencana atau sebelum bencana terjadi mesti diprioritaskan untuk meminimalisir dampak bencana. Kegiatan-kegiatan pra-bencana yang telah dilakukan diantaranya adalah pengenalan resiko bencana, pengetahuan mitigasi fisik dan non fisik, kesiapsiagaan dan manajemen tanggap darurat

Kata Kunci: Pengurangan Resiko Bencana, Nagari, Kesiapsiagaan

ANALYSIS OF CAPACITY BUILDING OF DISASTER VULNERABLE COMMUNITIES IN NAGARI BINJAI TAPAN AND NAGARI KAMPUNG TANGAH TAPAN

Zikri Alhadi¹, Pratiwi Nurhabibie², Azhari Syarief³

¹²Prodi Administrasi Publik., Universitas Negeri Padang

³Prodi Geografi, Universitas Negeri Padang

Email: zikrialhadi@fis.unp.ac.id

Abstract

Learning from the earthquake that hit West Sumatra Province on September 30, 2009, all elements of society should have tried to prepare themselves as early as possible so that they are always ready to face the worst. With the efforts to increase community preparedness in facing the threat of disaster, it is hoped that it can minimize the loss of life and property. In Nagari Binjai Tapan and Nagari Kampung Tengah Tapan, Pesisir Selatan Regency, as locations for community service, are geographically very vulnerable to various types of disasters such as flash floods, landslides, and earthquakes. The high level of vulnerability to this disaster has put many villages at risk, both for their population and for their livelihoods. For this reason, various pre-disaster activities in an effort to increase community resilience in the face of disasters also need to be planned and implemented. Pre-disaster or pre-disaster activities must be prioritized to minimize the impact of the disaster. Pre-disaster activities that have been carried out include the introduction of disaster risks, knowledge of physical and non-physical mitigation, preparedness and emergency response management.

Keywords: Disaster Risk Reduction, Nagari, Preparedness

PENDAHULUAN

Menurut Joseph Mayunga (2007) seorang peneliti kebencanaan dari Texas A & M University, pengalaman tsunami di Samudera Hindia pada Tahun 2004, Badai Katrina dan Rita pada tahun 2005, serta pemanasan global menggambarkan bahwa masyarakat dan orang-orang semakin menjadi lebih rentan terhadap bencana alam. Diperkirakan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, bencana mempengaruhi lebih dari 3 miliar jiwa, menewaskan lebih dari 750.000 jiwa, dan menimbulkan kerugian lebih dari US \$ 600 miliar. Tren hilangnya nyawa manusia dan kerusakan properti menunjukkan bahwa masyarakat kita tidak cukup tahan terhadap bencana alam. Selama beberapa dekade terakhir, banyak penulis telah menekankan kebutuhan

untuk mengakomodasi konsep ketahanan dalam penelitian, kebijakan, dan arena pengurangan risiko bencana.

Bencana alam merupakan peristiwa alam yang diakibatkan oleh proses alam, baik yang terjadi oleh alam itu sendiri maupun diawali oleh tindakan manusia yang menimbulkan resiko dan bahaya terhadap kehidupan manusia baik harta benda maupun jiwa. Karakteristik bencana alam ditentukan oleh karakteristik lingkungan fisik seperti; iklim, topografi, geologi, tanah, tata air, penggunaan lahan dan aktivitas manusia. Secara geologis, geomorfologis, dan klimatologis beberapa kawasan Sumatera Barat diindikasikan sebagai kawasan rawan bencana sehingga perlu dilakukan berbagai upaya mitigasi bencana.

Berbagai bencana sering melanda Sumatera Barat, baik bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia. Bencana yang sering terjadi adalah berupa gempa Bumi, longsor lahan, banjir, kebakaran, bencana akibat gerakan tanah, erosi pantai, dan gelombang pasang air laut. Jika diamati kejadian bencana yang melanda masyarakat Sumatera Barat, diketahui bahwa bencana yang terjadi sudah merupakan bencana yang datang dalam suatu siklus waktu tertentu (berulang). Bencana banjir dan longsor lahan telah merupakan bencana yang dihadapi pada setiap musim hujan, sedangkan kebakaran, erosi pantai, dan gelombang pasang air laut merupakan bencana langganan yang sering datang pada musim kemarau.

Berdasarkan itu semestinya berbagai kegiatan pra-bencana dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana juga harus dilakukan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kegiatan pra-bencana atau sebelum bencana terjadi harus lebih diutamakan dari kegiatan pasca-bencana. Kegiatan-kegiatan pra-bencana yang telah dilakukan diantaranya adalah pengenalan resiko bencana, kesiapsiagaan, mitigasi dan manajemen tanggap darurat bencana.

Sebagai wilayah rawan bencana banjir bandang dan longsor, Nagari Binjai Tapan dan Nagari Kampung Tengah Tapan dengan tingkat kerentanan yang cukup tinggi, maka semestinya masyarakat beserta pemerintahan nagari setempat mempunyai kapabilitas dalam memahami dan mengorganisir penanggulangan bencana berbasis komunitas. Artinya adalah bagaimana mengisi dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan perangkat pemerintahan setempat untuk mampu mengurangi resiko bencana yang dihadapi di wilayah mereka sendiri.

Permasalahan

1. Berdasarkan hasil observasi di wilayah tempat rencana pelaksanaan

pengabdian masyarakat, bahwa tingkat kerentanan yang tinggi terhadap resiko bencana banjir dan longsor. Hal ini disebabkan karena wilayah tersebut berada diantara dua sungai yang cukup besar yaitu Batang Aie Gedang dan Batang Aie Panjang. Secara geografis, sungai tersebut cukup sering berpindah jalur dan meluap dan mengakibatkan banjir bandang yang melanda pemukiman penduduk dan persawahan.

2. Rendahnya kapasitas kelompok masyarakat dalam mengorganisir penanggulangan bencana berbasis komunitas, dikarenakan minimnya pelatihan dan peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki. Kelompok Siaga Bencana sudah terbentuk, tetapi jarang mendapatkan peningkatan kapasitas dari instansi terkait sehingga diragukan kemampuannya saat terjadinya kondisi darurat. Ditambah dengan ketersediaan anggaran pengurangan resiko bencana yang minim.
3. Minimnya infrastruktur dasar yang menunjang upaya penanggulangan bencana seperti, akses transportasi, tempat evakuasi sementara, ketersediaan fasilitas air bersih, dan pemukiman yang berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan tingkat kerentanan banjir yang tinggi.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan yang digunakan dengan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah tersebut. Pelatihan dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada dan melibatkan *stakeholders* terkait seperti KSB, Perangkat Nagari dan Tokoh Masyarakat. Tim pengabdian dengan latar belakang Manajemen dan Kebijakan Publik,

Manajemen Bencana, Ilmu Sosial, dan Geografi, Pemberdayaan Masyarakat akan melakukan observasi tentang kerentanan wilayah, kondisi sosial, ekonomi, budaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian nantinya. Setelah informasi dan data diperoleh maka akan dilakukan analisis untuk pengurangan resiko bencana.

Dalam penyelesaian masalah yang dihadapi mitra maka perlu dirancang rencana kegiatan yang terstruktur untuk operasionalisasi di lapangan. Langkah pertama adalah merumuskan rancangan metode berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian sebagai bentuk hilirisasi riset. Langkah kedua dan ketiga adalah melakukan analisis resiko bencana dan observasi di lapangan untuk mengetahui tingkat kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat. Jika tingkat kerentanan sudah diketahui maka tim pengabdian bisa menyusun materi yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi. Keempat, dibutuhkan persetujuan dari mitra untuk pelaksanaan kegiatan terkait waktu dan lokasi pengabdian masyarakat. Kelima, melakukan diskusi dengan mitra tentang operasional dan teknik pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Keenam, tim bersama mitra melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Dan terakhir, melakukan evaluasi apakah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan berjakan efektif dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan bagian utama **Hasil** Keberhasilan program pengabdian masyarakat sangat tergantung dengan kerjasama yang baik di antara seluruh *stake holders* terkait, baik pelaksana, mitra, pemerintah, maupun masyarakat. Bentuk partisipasi dari mitra adalah memberikan akses yang luas untuk Tim Pengabdian

Masyarakat UNP dalam observasi dan berdiskusi terkait kerentanan terhadap resiko bencana khususnya bencana gempa dan tsunami. Selain itu mitra memberikan perizinan dan personel untuk membantu terlaksananya kegiatan pengabdian ini baik pada tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan keberlanjutan program. Mitra juga menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan serta fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan program ini.

Dengan demikian luaran dari pengabdian ini adalah sebuah hasil analisis kajian resiko bencana yang menjadi dasar upaya mewujudkan nagari siaga bencana secara optimal dan efisiensi serta disepakati oleh masyarakat. Adapun Solusi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

Analisis Risiko Bencana

Analisis resiko bencana adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk menghitung potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Risiko bencana dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Analisis resiko bencana menjadi dasar dalam penyusunan upaya mitigasi dalam suatu komunitas. Mitigasi dapat diartikan sebagai langkah-langkah pengurangan resiko bencana. Dibutuhkan pengetahuan yang memadai tentang resiko bencana disuatu wilayah agar upaya mitigasi menjadi lebih tajam dan tepat guna.

Tahapan dalam melakukan analisis resiko bencana, **Pertama** Identifikasi potensi bahaya yang ada di daerah, **Kedua** Identifikasi Bencana Turunan (*Collateral Disaster*) yang mungkin timbul karena dipicu oleh ancaman utama dan **Ketiga** Identifikasi faktor rona lingkungan yang berhubungan dengan potensi bahaya yang ada. Langkah selanjutnya adalah menghitung kerentanan

umum yang dimiliki daerah meliputi aspek regulasi dan perencanaan, aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat, dan aspek fasilitas serta lingkungan. (KOGAMI, 2016)

Pengurangan Risiko Bencana

Upaya pengurangan risiko bencana dapat dilakukan melalui peningkatan ketahanan komunitas. Konsep peningkatan ketahanan komunitas adalah dengan menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas komunitas. Peningkatan ketahanan komunitas dapat dilakukan berdasarkan sembilan komponen pengurangan risiko bencana yaitu : 1) Komitmen terhadap Pengurangan Risiko Bencana, 2) Pengkajian dan Pemantauan Risiko Bencana, 3) Rencana Aksi Komunitas untuk Pengurangan Risiko Bencana, 4) Kerjasama dalam Pengurangan Risiko Bencana, 5) Pengurangan Kerentanan , 6) Kesiapsiagaan , 7) Peringatan Dini , 8) Rencana Siaga dan Kontinjensi, dan 9) Penanganan Darurat. Peningkatan Kapasitas Komunitas dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan komunitas dalam mewujudkan manajemen pengurangan risiko bencana yang tepat dan baik serta penyediaan fasilitas pendukung. (KOGAMI, 2016).

Organisasi Dan Lembaga

Pembentukan organisasi dan lembaga pada semua level berfungsi untuk menjaga terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008.

Pada level komunitas masyarakat dibentuk organisasi penanggulangan bencana yang disebut Kelompok Penanggulangan Bencana (KPB). Kelompok ini beranggotakan dari berbagai unsur yang ada dalam komunitas. Kelompok ini dibentuk secara partisipatif bersama masyarakat dan diberi peningkatan kapasitas sehingga memiliki kemampuan dalam analisis risiko bencana di komunitas, penyusunan sistem pengurangan risiko bencana (PRB) di komunitas, pembuatan rencana aksi komunitas untuk pengurangan risiko bencana (RAK-PRB), membangun kesiapsiagaan di dalam komunitas serta memiliki kemampuan dalam penanganan darurat pada tahap awal terjadinya bencana di komunitas.

Dalam kegiatan PKM yang dilakukan dengan khalayak sasaran adalah stakeholders di Nagari Binjai Tapan dan Nagari Kampung Tengah Tapan adalah bagaimana menciptakan kesiapsiagaan masyarakat nagari dengan melakukan inisiasi pembentukan kelompok siaga masyarakat. Adapun secara garis besar ada dua materi utama yang disampaikan yaitu:

1. Pembentukan kelompok siaga bencana masyarakat sebagai bagian dari upaya pembentukan nagari tangguh bencana. Adapun beberapa indikator nagari/desa tangguh bencana yang mesti dipenuhi adalah:
 - a. Legislasi (penyusunan peraturan nagari terkait dengan upaya penanggulangan bencana di tingkat nagari).
 - b. Penyusunan rencana penanggulangan bencana di tingkat nagari, rencana kontinjensi bencana yang spesifik dan rencana-rencana lainnya. Semua rencana yang dibuat mestilah berbasis komunitas.
 - c. Penguatan Kelembagaan organisasi penanggulangan

bencana berbasis komunitas. Stakeholders yang terlibat adalah pemerintah nagari, Bamus Nagari, Niniak Mamak, Pemuda Nagari, Bundo Kandung dan lain-lain.

- d. Memprioritaskan pendanaan untuk program-program penanggulangan bencana baik dalam bentuk fisik maupun pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
- e. Melakukan Program peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat sehingga memiliki kemampuan untuk menanggulangi bencana secara profesional, efektif dan efisien.
- f. Mengarusutamakan kegiatan-kegiatan mitigasi struktural dan non struktural.

Komitmen pembentukan Nagari Tangguh Bencana di atas sudah menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh stakeholders yang terkait di Nagari Binjai Tapan dan Nagari. Ini dibuktikan dengan upaya pemerintah nagari berdasarkan hasil konsultasi dengan Bamus Nagari bersepakat untuk melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktural. Upaya mitigasi struktural yang dilakukan adalah dengan mengajukan proposal untuk membangun pengendalian banjir ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pemrov Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sementara upaya mitigasi non struktural yang dilakukan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Nagari beserta stakeholders terkait adalah perumusan pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari. Pembentukan ini nantinya akan dilanjutkan dengan upaya peningkatan kapasitas KSB Nagari secara berkala sehingga mempunyai kesiapan yang cukup dalam upaya penanggulangan bencana.

Selanjutnya, pelatihan yang telah dilaksanakan mendapatkan respon yang

positif dari pemangku kepentingan di nagari yang hadir saat pelaksanaan kegiatan. Beberapa respon yang di dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan PKM yang dilakukan diakui oleh peserta sangat bermanfaat untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat nagari terutama dalam menghadapi resiko bencana banjir yang seringkali melanda wilayah tersebut.
2. Materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan terutama terkait inisiasi pembentukan kelompok siaga bencana berbasis masyarakat nagari.
3. Ada upaya dari pemerintah nagari dalam menindaklanjuti pembentukan kelompok siaga bencana dengan akan mengadakan rapat Bamus Nagari yang mengadakan musyawarah terkait hal tersebut.

dilaksanakan terhadap stakeholders terkait, maka hasil yang didapat tergambar melalui respon para peserta. Tim PKM mengelompokkan respon tersebut menjadi dua kategori, yaitu

Pertama, respon lisan berupa apresiasi positif yang dikemukakan peserta terhadap kegiatan yang terlaksana. Semenjak masa observasi para Perangkat Nagari, anggota Bamus Nagari, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat menerima kehadiran tim dengan baik, terbuka dan secara lisan menyatakan kesediannya untuk berperan aktif dalam kegiatan PKM IPTEKS. Pada akhir kegiatan, peserta juga menyatakan keinginannya agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan terjadwal.

Kedua, kesediaan lisan peserta untuk mengikuti kegiatan PKM IPTEKS diwujudkan dengan aksi nyata. Para peserta mengikutinya dengan baik dibuktikan dengan bersikap aktif berdiskusi sepanjang kegiatan. Sepanjang berlangsungnya

workshop, para peserta bahkan secara aktif bertanya mengenai materi yang kurang dipahami, misalnya: bagaimana kebijakan penanggulangan bencana yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, bagaimana mekanisme sistem peringatan dini yang efektif, bagaimana cara memperkuat kapasitas kelembagaan dan individu di KSB, serta bagaimana cara membuat rencana dan peta evakuasi. *Ketiga*, respon dari metode evaluasi terstruktur. Secara rinci berikut hasil yang dicapai:

1. Pengetahuan dan Pemahaman Peserta

Berdasarkan hasil wawancara setelah kegiatan, tim mendapati respon peserta sangat positif terhadap kegiatan ini. Peserta mengaku banyak mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah kebijakan penanggulangan bencana yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana harusnya bersikap terkait dengan kebijakan tersebut. Peserta bahkan memberikan masukan yang positif agar kebijakan penanggulangan bencana benar-benar dilakukan dengan efektif dan bermanfaat bagi keberlangsungan lembaga KSB sebagai motor penggerak kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Pengetahuan yang diberikan adalah, sistem peringatan dini tsunami dan pembuatan peta dan rencana evakuasi masyarakat.

2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pembentukan dan operasionalisasi KSB menghadapi berbagai kendala seperti minimnya dana, perlengkapan, peralatan dan pelatihan. Untuk itu, tim pengabdian UNP akan memfasilitasi KSBM membuat proposal pengajuan kelengkapan operasional kepada instansi terkait seperti pemerintah daerah, kementerian, BNPB, dan berbagai LSM yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana. Hal ini dibutuhkan agar KSB segera beraktifitas untuk dapat dirasakan manfaat kehadirannya di

masyarakat. Tim juga memberikan tips dan trik untuk membuat proposal kegiatan dan pengadaan perlengkapan siaga bencana ke berbagai instansi, baik pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat. Untuk keberlanjutannya Tim juga menyampaikan kesanggupan untuk memberikan rekomendasi kepada beberapa instansi terkait untuk mempertimbangkan proposal dari KSB untuk segera aktif secara operasional dalam aktifitas penanggulangan bencana.

Diskusi

Sesuai dengan konsep manajemen bencana oleh Purnomo (2010) yaitu: “seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana”. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan konsep penguatan kapasitas masyarakat rentan bencana merupakan implementasi memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana. Dengan mempersiapkan masyarakat secara individu maupun kelembagaan KSB untuk menghadapi ancaman bencana merupakan fokus utama penguatan kapasitas untuk mengurangi kerentanan.

Di sisi lain, Carter dalam Purnomo (2010) menjelaskan “pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu terapan (aplikatif) yang mencari, dengan mengobservasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan - tindakan (measures) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat, dan pemulihan. Dalam Kegiatan ini, penguatan kapasitas berfokus pada bagaimana mengutamakan aspek preventif (pencegahan) untuk meminimalisir dampak bencana gempa dan tsunami jika terjadi.

Tujuan manajemen bencana secara sederhana tentu saja meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan harta benda. Banyak pihak yang kurang menyadari pentingnya mengelola bencana dengan baik. Salah satu faktornya adalah bencana belum

tahu kapan dan dimana pastinya akan terjadi walaupun ancamannya bisa diperkirakan. Dengan dilakukannya pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa jika bencana gempa dan tsunami terjadi. Menurut Ramli (2010), ada beberapa tujuan manajemen bencana, yaitu:

1. Mempersiapkan diri untuk menghadapi semua bencana atau kejadian yang tidak diinginkan
2. Menekan kerugian dan korban yang dapat timbul akibat dampak suatu bencana atau kejadian.
3. Meningkatkan kesadaran semua pihak dalam masyarakat atau organisasi tentang bencana sehingga terlibat dalam proses penanganan bencana.
4. Melindungi anggota masyarakat dari bahaya atau dampak bencana sehingga korban dan penderitaan yang dialami dapat dikurangi.

Kegiatan pengabdian masyarakat UNP di Nagari Binjai Tapan dan Nagari Kampung Tengah Tapan ini merupakan implementasi dari tujuan manajemen bencana. Seperti yang dikemukakan oleh Ramli di atas bahwa dengan adanya pengabdian masyarakat ini diharapkan khalayak sasaran bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami dengan memperkuat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan mengapa bencana terjadi dan tindakan apa saja yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman diharapkan bisa menekan kerugian dan korban yang mungkin terdampak jika bencana terjadi.

Penguatan kapasitas kelembagaan KSB sebagai motor kesiapsiagaan masyarakat di tingkat Nagari juga merupakan implementasi dari tujuan manajemen bencana yaitu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dan organisasi sehingga terlibat aktif sebagai

pelaku dalam penanggulangan bencana. Masyarakat dengan dimotori oleh KSBM menjadi penyelamat bagi diri sendiri dan keluarga mereka ketika bencana terjadi karena secara individu dan organisasi sudah memiliki kapasitas yang memadai. Sehingga tujuan utama dari manajemen bencana yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah melindungi anggota masyarakat dari bahaya dan dampak bencana gempa dan tsunami sehingga korban dan penderitaan bisa diminimalisir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengacu pada pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat rentan bencana banjir bandang sebagai pembentukan nagari tangguh bencana dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 7- 9 September 2018 di Nagari Binjai Tapan Nagari Kampung Tengah Tapan mendapat apresiasi positif. Camat dan Jajaran, Wali Nagari, Perangkat Nagari, Anggota Bamus, dan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda sangat antusias mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini.
2. Materi yang disampaikan ketika kegiatan pengabdian sesuai dengan kebutuhan nagari dan materi tersebut menambah pengetahuan dan pemahaman serta peningkatan kapasitas stakeholders terkait dalam penanggulangan bencana.

Saran

Guna perbaikan di masa depan, maka disarankan beberapa hal berikut:

1. Kegiatan pelatihan disarankan untuk dilaksanakan secara berkesinambungan dan rutin agar

peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami bisa tercapai

Perlu difasilitasi penyusunan rencana kegiatan selama satu tahun ke depan dan bagaimana mendapatkan dukungan dana, peralatan dan pelatihan agar KSBM bisa berdayaguna dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana gempa dan tsunami.

DAFTAR REFERENSI

BPBD Kota Padang. (2013). Rencana Kontijensi Tsunami Kota Padang

ISDR. (2005) *Hyogo Framework for Action 2005 - 2015* Japan, ISDR

KOGAMI (2016) Dokumen PRB, Padang

Mayunga. (2007). *Understanding and Applying the Concept of Community Disaster Resilience: A capital-based approach*, Munich, UN University

TIM LIPI. (2006). *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa dan Tsunami di Indonesia*. Bandung : LIPI